

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI MANAJER KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Wallensy Septi Pratiwi, Ridwan Nurazi, Lisa Martiah NP

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

The purpose of this research is to analyze the influence of the government's internal control system, the competence, and the educational background of the financial management officers toward the quality of government of finance report. This research was conducted in the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province. The populations of this research were all financial management officers from one regional office and 10 districts residing in the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province which have a working period of more than one year. The data are collected from 100 financial administrators through questionnaires. The data analysis method of this research was multiple linear regressions. The results show that the government's internal control system, and the competence have a positive effect on the quality of government of finance report. Meanwhile, the educational background does not have effect on the quality of government of finance report. The implication of this research is to produce quality of financial reports at the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province, conducted with applying the internal control system, and improving employee competency.

Keywords: Internal Control System, Competence, Educational Background, Finance Report Quality

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah diatur dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara pada Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Kualitas penyajian laporan keuangan sangat penting dalam perwujudan good government governance (GGG). Pemerintah telah mengupayakan pemberlakuan kewajiban kepada seluruh Kementerian dan Lembaga dalam hal ini sebagai pihak yang dipercaya untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pengguna laporan keuangan yakni masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawasan dan pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Kenyataannya bahwa opini laporan keuangan Kementerian Agama mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan (DPP) dan nilai penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih CC (Cukup Baik/Memadai), merupakan indikasi bahwa

pelaksanaan akuntabilitas kinerja saat ini masih dirasakan kurang berjalan, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji:

- Pengaruh positif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.
- Pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.
- Pengaruh positif latar belakang pendidikan pegawai pengelola keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah...

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Stewardship

Menurut Thomas (2006) teori stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Pemerintah bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi pemerintahan dan latar belakang pendidikan disiplin ilmu akuntansi. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas

2.2. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

COSO juga memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah: lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko manajemen (management risk assessment), sistem komunikasi dan informasi (information and communication system), aktivitas pengendalian (control activities), monitoring.

2.4. Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterlampiran dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2013) kompetensi adalah

karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterlampilan, dan sikap sesuai tugas dan /atau fungsi jabatan.

2.5. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan formal berkaitan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterlampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman. Dengan pendidikan formal yang memadai, staf bagian keuangan/akuntansi akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal staf bagian keuangan/akuntansi dan dengan latar belakang akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan (Muzahid, 2014).

2.6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Herawati (2014) membuktikan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan entitas menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.7. Kompetensi dan Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dimana kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sudiarianti (2015) bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan melalui penerapan SPIP dan SAP. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.8. Latar Belakang Pendidikan dan Kualitas Laporan Keuangan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang dibutuhkan principals, maka Pemerintah dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu memperhatikan pendidikan pengelola laporan keuangan. Pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan sebagai bagian dari kapasitas SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan. Wiraputra (2014) bahwa latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Sistem Pengendalian Interen.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 5 indikator, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Instrumen ini berjumlah 15 pertanyaan (Rozi, 2016) dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya sistem pengendalian intern pemerintah sangat rendah. Skala 2 JS (Jarang Sekali), artinya sistem pengendalian intern pemerintah rendah. Skala 3 KK (Kadang-Kadang), artinya sistem pengendalian intern pemerintah telah cukup. Skala 4 S (Sering), artinya sistem pengendalian intern pemerintah tinggi. Skala 5 SS (Sangat Sering), artinya sistem pengendalian intern pemerintah sangat tinggi

3.1.2. Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan /atau fungsi jabatan (Badan Kepegawaian Negara, 2013). Variabel kompetensi diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 3 indikator yaitu: pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. Instrumen ini berjumlah 10 pertanyaan (Santoso, 2016) dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya staf keuangan sangat tidak berkompoten. Skala 2 JS (Jarang Sekali), artinya staf keuangan tidak berkompoten. Skala 3 KK (Kadang-Kadang), artinya staf keuangan kurang kompeten. Skala 4 S (Sering), artinya kompetensi. Skala 5 SS (Sering Sekali), artinya kompetensi sangat tinggi.

3.1.3. Latar Belakang Pendidikan

Menurut Wiraputra (2014) menyatakan bahwa pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang didukung dan diimbangi dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi mencukupi sehingga dalam penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan baik. Pengukuran variabel latar belakang pendidikan menggunakan skala nominal yakni 1 (satu) untuk berlatar belakang pendidikan akuntansi, 0 (nol) untuk berlatar belakang pendidikan non akuntansi.

3.1.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

. kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang memuat 4 indikator, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Instrumen ini berjumlah 15 pertanyaan (Santoso, 2016) dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya kualitas laporan keuangan sangat rendah. Skala 2 JS (Jarang Sekali), artinya kualitas laporan keuangan rendah. Skala 3 KK (Kadang-Kadang), artinya kualitas laporan keuangan

telah cukup. Skala 4 S (Sering), artinya kualitas laporan keuangan baik. Skala 5 SS (Sangat Sering), artinya kualitas laporan keuangan sangat baik..

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Bendahara, Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PPABP), Pengelola Barang Milik Negara, Pengelola Barang, Operator SIMAK, Operator SAIBA. Untuk dapat menyelesaikan penyebaran kuesioner tersebut, peneliti memperkirakan waktu selama 2 minggu.

3.3. Metode Analisis

Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien korelasi
X1	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
X2	= Kompetensi
X3	= Latar Belakang Pendidikan
e	= Error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Regresi

Tabel 1. Menunjukkan bahwa nilai F sebesar 69,429 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah atau dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi, dan latar belakang pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan dengan kata lain model yang digunakan fit (model sesuai).

Sementara itu, besarnya adjusted R² (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,675. Nilai ini menunjukkan bahwa 67,5% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi, dan latar belakang pendidikan, sedangkan sisanya 32,5% dijelaskan oleh variabel lain

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikonfirmasi pada

tabel 1 Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) adalah 1,307. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikonfirmasi pada tabel 1. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi (X2) adalah 0,349. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikonfirmasi pada tabel 1. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel latar belakang pendidikan (X3) adalah 0,053. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,591. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel latar belakang pendidikan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H3 ditolak.

Table 1. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-value	Sig
Konstanta	-2,863	-0,540	0,591
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,307	10,011	0,000
Kompetensi	0,348	4,334	0,000
Latar Belakang Pendidikan	0,053	0,539	0,591
Latar Belakang Pendidikan	0,053	0,539	0,591

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh tim satgas (satuan tugas) SPIP sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Pengawasan dan pengarahan dilaksanakan dengan mengadakan rapat antara pimpinan dengan pengelola keuangan. Pelaksanaan identifikasi risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu didasarkan atas beberapa hal, yaitu identifikasi risiko berdasarkan hasil reвью Inspektorat Jenderal dan Audit BPK-RI. Risiko yang teridentifikasi dipilih dari kegiatan strategis yang dianggap memiliki risiko tinggi dan menetapkan tujuan identifikasinya, yaitu pelaksanaan anggaran dimana adanya perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan, dan pengelolaan barang/aset milik negara. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dengan (1) menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan kas yang berasal dari Surat Perintah Pembayaran Dana Belanja (SP2D) persediaan dari bendahara dan membatasi pengeluaran uang yang menggunakan SP2D Bendahara secara selektif, (2) memberikan peringatan dini kepada PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar tidak lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabannya, (3) meningkatkan pemahaman dan ketrampilan para

petugas/operator Aplikasi Persediaan, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada masing-masing satker.

Pengendalian informasi dan komunikasi yang dilakukan pimpinan dengan membuat standar operasional pegawai terkait dengan tugas pokok pengelolaan keuangan. Sedangkan pengendalian komunikasi dilakukan dengan pengendalian secara sistematis dan berjenjang mulai dari pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan serta pembuat komitmen. Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan monitoring secara berkala ke setiap Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu, melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan SPIP pada satuan kerja, Kementerian Agama Kabupaten/Kota supaya memberikan laporan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per bulan, triwulan, per semester dan tahunan, dan memantau Barang Milik Negara secara periodik 1 tahun sekali.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, sebagaimana penelitian yang dilakukan Herawati (2014) membuktikan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sudiarianti (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif penerapan SPIP pada kualitas LKPD Pemkab Tabanan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Surastiani (2015) dan Rozi (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi pengelola keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan semakin baik. Peningkatan kompetensi melalui pemahaman dalam pengelolaan keuangan, pengetahuan mengenai keuangan yang diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelatihan diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam bentuk kegiatan workshop laporan keuangan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan. Keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, dan kemampuan mengoperasikan sistem informasi keuangan serta terampil dalam menyusun laporan keuangan dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan pengoperasian aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN yang diselenggarakan oleh subbag keuangan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu maupun Kementerian Agama RI.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2012) menyatakan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan dekonsentrasi pada satuan kerja Pemerintah Aceh. Sudiarianti (2015) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Tabanan. Sejalan dengan penelitian Santoso (2016) dan Arifin (2016) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang yang dimiliki oleh pengelola keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat fakta bahwa pengelola keuangan didominasi latar belakang pendidikan diluar akuntansi. Pemahaman penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengelola keuangan yang sebagian besar bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi adalah dengan memberikan pelatihan dalam bentuk sosialisasi/workshop di bidang keuangan dan didukung dengan monitoring pelaksana anggaran. Untuk membantu proses dalam menghasilkan informasi laporan keuangan juga didukung oleh pengaplikasian komputer akuntansi. Tindakan yang dilakukan adalah dengan rekonsiliasi internal

setiap bulannya antara operator SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal) satker dengan operator SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mengurangi kekeliruan transaksi oleh pengelola keuangan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartati (2016) menyatakan pendidikan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Wiraputra (2014) yang menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya Muzahid (2014) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan..

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh pada penelitian di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu:

- Adanya pengaruh positif signifikan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.
- Kompetensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin baik.
- Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya manusia pengelola keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi didukung dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan pelatihan rutin dalam bentuk sosialisasi/workshop oleh Kementerian Keuangan dan didukung Kementerian Agama. Adanya penggunaan aplikasi keuangan bagi pengelola keuangan yang memudahkan dalam proses pekerjaan untuk menghasilkan laporan keuangan.

References

- Agus, Sukrisno., dan Ardana, I Cenic. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Arifin, Muhammad Naufal. (2016). *Kualitas Laporan Keuangan Dan Kepercayaan Stakeholder (Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Mataram)*. *Journal of Auditing Finance and Forensic Accounting*. Volume 04. Nomor 2. Hal 121-144.
- Astuti, Dwi Christina. (2007). *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Volume 2. Nomor 1. Hal 27-42.
- Badan Kepegawaian Negara. (2013). *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara*.
- Dearni. (2013). *Pengaruh Kompetensi, Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan*. Tesis. Bengkulu, Program Magister Akuntansi.
- Emmyah, (2009). *Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Politeknik Negeri Ujung Pandang*. Tesis. Makasar, Program Magister Ilmu Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Fikri, M Ali., Inapty, Biana Adha., Martiningsih Sri Pancawati. (2015). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd-Skpd Di Pemprov. Ntb)*. *Jurnal Ilmu Akuntansi Universitas Mataram*. Volume 9. Nomor 1. Hal 27-42.

- Fontanella, Amy. (2010). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 5. Nomor 2. Hal 22-30.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartati. (2016). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*. Volume 4. Nomor 9. Hal 41-52.
- Hazrita, Fadhilah. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi Lembaga Penelitian Universitas Riau*. Volume 9. Nomor 1. Hal 59-69.
- Herawati, Tuti. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Jurnal Study & Accounting Research*. Volume XI. Nomor 1. Hal 1-14.
- Ichlas, Muhammad., Basri, Hasan., dan Arfan, Muhammad. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 3. Nomor 4. Hal 76-84.
- Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2010. tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Jaharman. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis. Bengkulu, Program Magister Akuntansi.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis. Erlangga. Jakarta.
- Kurniawan. (2015). Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara. Tesis. Bengkulu, Program Magister Akuntansi.
- Lembaga Administrasi Negara. (2011). Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Marda, Gita Silvia. (2013). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai. Skripsi, Universitas Riau.
- Muzahid, Mukhlisul. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Lhokseumawe*. Volume 2. Nomor 2. Hal 179-196.
- Nugraha, Tutut Kusna. (2015). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Telaah Akuntansi*. Volume VI. Nomor 2. Hal 192-203.
- Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Ponamon, Irene Francisca. (2013). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 9. Nomor 2. Hal 68-80.
- Pusdiklatwas BPKP. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen. Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Edisi Sembilan.
- Rahman, Aulia., Darwanis., dan Siswar, Dana. (2012). Pengaruh Kompetensi, Pelatihan dan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Dana Dekonsentrasi (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang Mengelola Dana Dekonsentrasi). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*. Volume 2. Nomor 1. Hal 1-14.
- Raharjo, Eka. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. Volume 2. Nomor 1. Hal 37-46.
- Rakhmayani, Alfita., dan Sudarno. (2014). Studi Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 3. Nomor 2. Hal 1-10.
- Rozi, Fachrur. (2016). Analisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Tesis. Bengkulu, Program Magister Manajemen.
- Santoso. (2016). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Kaur. Tesis. Bengkulu, Program Magister Manajemen.
- Setiawati, Erma., dan Sari, Shinta Permata. (2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *Seminar Nasional dan Call For Paper UMS 2 (6): 427-444* ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Sudiarianti, Ni Made., Ulupui, I Gusti Ketut Agung., dan Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Symposium Nasional Akuntansi 18*.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

-
- Supeno, Hardi. (2011). Pengaruh Partisipasi Manajemen terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan., Transparansi, dan Akuntabilitas melalui Akuntansi Instansi (Studi pada Instansi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga/Unit Pemerintah Wilayah Jawa Timur). *Majalah Ekonomi*. Nomor 2. Hal 155-164.
- Surastiani, Dyah Puri., dan Handayani, Bastari Dwi. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Volume 7. Nomor 2. Hal 139-149.
- Sushanty, Eva. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu . Tesis. Bengkulu, Program Magister Manajemen.
- Thomas, S. Kaihatu. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 8. Nomor 1 Ed Maret. Hal 1-9.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara.
- Wansyah, Hendra., Darwanis., & Bakar, Usman. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1. Nomor 1. Hal 43-58.
- Wiraputra, Wayan Kusuma., Sinarwati, Ni kadek., dan Herawati, Nyoman Trisna. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *E-jurnal S1 Akuntansi*. Volume 2. Nomor 1. Hal 1-10.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.